



PENETAPAN

Nomor 334/Pdt.P/2023/MS.Tkn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Takengon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Ismail Bin Ramli, Nik 1117071211820001, tempat/ tgl lahir Tetingi, 12/11/1982, Umur ± 41 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SLTP/Sederajat, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon I.

Raodah Binti Halidin, Nik 1104035112870006, tempat/ tgl lahir, Bebesen 11/12/1987, Umur ± 36 tahun, agama Islam, kewarganegaraan Indonesia, pendidikan SI, pekerjaan Guru, Tempat tinggal Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Takengon pada tanggal 11 Oktober 2023 dengan register perkara Nomor 334/Pdt.P/2023/MS.Tkn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah sepasang suami isteri telah menikah menurut hukum islam, pada tanggal **03 Februari 2019** di

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Jubir** (Abang Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Muslim** dan **M Yunus** sebagai saksi dalam pernikahan.

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus Janda dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan, Para Pemohon tinggal di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Rifki Ahmad Bin Ismail**, jenis kelamin laki-laki tempat tanggal lahir Takengon 04/02/2020;
5. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam (Murtad);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga atau masyarakat yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang terjadi pada tanggal **03 Februari 2019** di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah, karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Setempat karena pada saat menikah perekonomian keluarga masih sulit dan terkendala administrasi pernikahan untuk membayar administrasi pernikahan;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan pengesahan nikah (itsbat nikah) sebagai bukti nikah Pemohon I dengan Pemohon II untuk mengurus pendaftaran perkawinan

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen serta keperluan administrasi kependudukan lainnya;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang Pemohon kemukakan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Mahkamah Syar'iyah Takengon segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengesahkan/menetapkan pernikahan Pemohon I (**Ismail Bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Raodah Binti Halidin**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal **03 Februari 2019** di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
4. Menetapkan biaya perkara menurut peraturan dan perundang - undangan yang berlaku;

Subsida:

Apabila majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Hakim Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah Syar'iyah Takengon sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kartu Keluarga, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Akta Cerai atas nama Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syariahy Takengon Kabupaten Aceh Tengah bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Muslim bin M. Amin** di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada tanggal **03 Februari 2019** di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Jubir** (Abang Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Muslim** dan **M Yunus** sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka dan janda, Pemohon II telah bercerai secara resmi pada taun 2013, kemudian menikah dengan Pemohon I;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, mahram, sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan tidak sahny pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara Para

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon belum pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

2. **M. Yunus bin M. Amin**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Saksi kenal dengan Para Pemohon karena sebagai Sepupu dari Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada tanggal **03 Februari 2019** di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Jubir** (Abang Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh yang bernama **Muslim** dan **M Yunus** sebagai saksi dalam pernikahan;
- Bahwa pada saat Para Pemohon menikah saksi hadir;
- Bahwa dari pernikahan Para Pemohon telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa status Pemohon I saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak dan janda;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Para Pemohon tidak ada hubungan darah, mahram, sesusuan atau hubungan lainnya yang menyebabkan tidak sah nya pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu atau mendengar ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon dan antara Para Pemohon belum pernah bercerai serta masih tetap beragama Islam sampai dengan saat ini;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Takengon selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah pada tanggal **03 Februari 2019** di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Jubir** (Abang Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh kerabat dekat Pemohon antara lain yang bernama **Muslim** dan **M Yunus** sebagai saksi dalam pernikahan, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk keperluan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan Akta Cerai atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga dan terbukti pula

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum menikah dengan Pemohon I Pemohon II adalah seorang janda berdasarkan alat bukti P,2

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon, maka Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon karena telah sesuai dengan Pasal 308 RB.g dan 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri Yang menikah tanggal **03 Februari 2019** di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah, dan yang menjadi wali nikah adalah **Jubir** (Abang Kandung Pemohon II), dengan mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram dengan disaksikan oleh yang bernama **Muslim** dan **M Yunus** sebagai saksi dalam pernikahan
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai; dan tidak pernah keluar dari agama islam
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk administrasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Hakim Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat hakim hakim tersebut diatas, maka hakim hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Ismail Bin Ramli**) dengan Pemohon II (**Raodah Binti Halidin**) yang dilaksanakan pada tanggal tanggal **03 Februari 2019** di Kampung Empus Talu, Kecamatan Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bebesen Kabupaten Aceh Tengah
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sejumlah Rp. 260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Mahkamah Syar'iyah Takengon pada hari Kamis, tanggal 9 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Akhir 1445 Hijriah oleh Dangas Siregar, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Agus Hardiansyah, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;.

Hakim Tunggal,

Dangas Siregar, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agus Hardiansyah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	260.000,00

(dua ratus enam puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Mahkamah Syar'iyah Takengon

Izwar Ibrahim, Lc., LL.M.

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.334/Pdt.P/2023/MS.Tkn